

Analisis Framing Pemberitaan Revisi UU TNI pada Kompas.com dan Tempo.co dalam Kontestasi Demokrasi Digital

Nurul Hidayat, Syakira Muti Adelfi

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila

Jl. Lenteng Agung Raya No.56, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630, Indonesia

Email: nurulhidayat@univpancasila.ac.id

Diterima 12 April 2026, Disetujui 25 Mei 2026

ABSTRAK

Transformasi media digital telah mengubah cara media mengonstruksi dan mendistribusikan realitas politik dalam ruang publik. Polemik revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tahun 2025 menjadi isu strategis yang memunculkan kontestasi diskursus demokrasi, khususnya terkait relasi sipil-militer dan supremasi sipil di Indonesia. Dalam konteks tersebut, Kompas.com dan Tempo.co menampilkan *framing* pemberitaan yang berbeda terhadap revisi UU TNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *framing media* dalam kontestasi diskursus demokrasi atas pemberitaan revisi UU TNI pada Kompas.com dan Tempo.co. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing* model Robert N. Entman terhadap 50 berita yang terdiri atas 30 berita Kompas.com dan 20 berita Tempo.co periode Maret–April 2025. Analisis dilakukan melalui empat perangkat *framing Entman*, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung membingkai revisi UU TNI dalam kerangka formalistik-institusional yang menormalisasi kebijakan sebagai kebutuhan regulatif negara, sedangkan Tempo.co membingkai isu dalam perspektif kritis-demokratis yang menyoroti potensi pelemahan supremasi sipil. Temuan ini menunjukkan bahwa *framing media* tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga menjadi arena kontestasi makna dan kekuasaan simbolik dalam demokrasi digital.

Kata Kunci: *Framing Media*; Demokrasi Digital; Komunikasi Politik; Revisi UU TNI

Media Framing of the Revision of the TNI Law and the Contestation of Democratic Discourse in the Digital Space

ABSTRACT

The transformation of digital media has reshaped how political realities are constructed and distributed within the public sphere. The 2025 revision of the Indonesian National Armed Forces Law (UU TNI) emerged as a strategic issue that generated contestation over democratic discourse, particularly concerning civil-military relations and civilian supremacy in Indonesia. In this context, Kompas.com and Tempo.co presented different framing patterns in reporting the revision of the UU TNI. This study aims to analyze media framing in the contestation of democratic discourse surrounding the coverage of the UU TNI revision on Kompas.com and Tempo.co. This study employs a qualitative approach using Robert N. Entman's framing analysis model on 50 news articles consisting of 30 articles from Kompas.com and 20 articles from Tempo.co published between March and April 2025. The analysis applies Entman's four framing devices: define problems, diagnose causes, make moral judgment, and treatment recommendation. The findings reveal that Kompas.com tends to frame the UU TNI revision within a formalistic-institutional perspective that normalizes the policy as a regulatory necessity, whereas Tempo.co frames the issue within a critical-democratic perspective emphasizing the potential weakening of civilian supremacy. These findings demonstrate that media framing not only represents reality but also functions as an arena for the contestation of meaning and symbolic power in digital democracy.

Keywords: *Digital Democracy; Media Framing; Political Communication; UU TNI Revision*

PENDAHULUAN

Transformasi ekosistem media digital dalam beberapa tahun terakhir telah secara fundamental merekonfigurasi proses produksi, distribusi, dan konstruksi makna realitas politik dalam ruang publik digital. (Pugu et al., 2024) . Media daring tidak lagi berfungsi sebagai saluran netral penyampai informasi, melainkan sebagai aktor diskursif yang aktif membentuk makna melalui seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, serta konstruksi narasi dalam pemberitaan (Yusnaini et al., 2025). Dalam konteks ini, realitas kebijakan publik tidak hadir sebagai entitas objektif, tetapi sebagai hasil produksi simbolik yang dinegosiasikan dalam ruang digital yang semakin kompetitif (Olsen & Sjøvaag, 2025). Dinamika ini semakin diperkuat oleh logika platform yang menempatkan visibilitas dan keterlibatan sebagai parameter utama dalam produksi berita (Hastuti et al., 2025).

Dalam kerangka komunikasi politik kontemporer, *framing* menjadi konsep kunci untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap isu kebijakan (Ariel & Elishar, 2025). *Framing* tidak hanya menentukan apa yang dianggap penting, tetapi juga bagaimana isu dimaknai melalui definisi masalah, atribusi sebab, evaluasi normatif, dan rekomendasi solusi (Koivula et al., 2024). Sejumlah studi mutakhir menunjukkan bahwa *framing* memiliki pengaruh signifikan terhadap legitimasi kebijakan dan pembentukan opini publik (Marttila & Koivula, 2025). Namun demikian, terdapat perdebatan mengenai sejauh mana *framing* masih ditentukan oleh orientasi editorial di tengah dominasi distribusi berbasis algoritma (Berk, 2025a).

Isu revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada tahun 2025 muncul dalam konfigurasi tersebut dan menjadi salah satu isu strategis yang memicu perdebatan luas di ruang publik (Ikhwan Nur Ramadhan et al., 2025). Revisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis regulasi pertahanan, tetapi juga menyentuh dimensi fundamental demokrasi, khususnya relasi sipil-militer. Dalam literatur kontemporer, supremasi sipil merupakan prinsip utama dalam menjaga kualitas demokrasi, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi memperluas peran militer menjadi isu yang sensitif (Croissant et al., 2011).

Dalam konteks Indonesia, relasi sipil–militer memiliki dimensi historis yang kompleks karena pengalaman masa Orde Baru menempatkan militer tidak hanya sebagai aktor pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik dalam pemerintahan dan kehidupan sipil. Oleh sebab itu, setiap wacana perluasan peran TNI dalam ruang sipil, termasuk melalui revisi UU TNI, tidak dapat dipahami sekadar sebagai perubahan regulatif, tetapi juga sebagai isu demokrasi yang berkaitan dengan supremasi sipil, kontrol sipil atas militer, dan arah

konsolidasi demokrasi pascareformasi. Dalam situasi tersebut, *framing media* menjadi strategis karena cara media mendefinisikan, menonjolkan, dan mengevaluasi revisi UU TNI dapat memengaruhi pemahaman publik terhadap apakah kebijakan tersebut dipandang sebagai kebutuhan institusional negara atau sebagai potensi kemunduran demokrasi (Khairurrizqo, 2024).

Dalam situasi tersebut, media berperan sebagai mediator simbolik yang menentukan bagaimana publik memahami dan mengevaluasi kebijakan (Santos et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa dalam isu keamanan dan pertahanan, publik sangat bergantung pada media karena keterbatasan akses terhadap informasi primer (Happer & Philo, 2013). Hal ini menjadikan *framing media* sebagai faktor kunci dalam membentuk legitimasi kebijakan negara. Dalam konteks media digital, peran ini menjadi semakin kompleks karena framing tidak hanya diproduksi oleh redaksi, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika distribusi berbasis algoritma (Mansoor, 2024).

Meskipun demikian, representasi media terhadap isu politik tidak bersifat homogen. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa media dengan orientasi editorial berbeda menghasilkan *framing* yang berbeda pula (Figenschou & Thorbjørnsrud, 2022; Brüggemann et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, studi menunjukkan adanya perbedaan antara media yang berorientasi stabilitas institusional dan media yang mengedepankan fungsi kritik terhadap kekuasaan (Tunca & Budhathoki, 2026). Perbedaan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk posisi ideologis dalam diskursus publik (Nasrullah, 2026).

Akan tetapi, sebagian besar kajian *framing* masih berfokus pada isu elektoral dan figur politik, sementara analisis terhadap *framing* kebijakan sipil–militer dalam media digital masih relatif terbatas (Agustina et al., 2024). Selain itu, banyak studi *framing* yang berhenti pada level identifikasi struktur teks tanpa mengaitkannya dengan implikasi yang lebih luas terhadap diskursus demokrasi (López-Rabadán, 2022). Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kritis dalam memahami *framing* sebagai praktik produksi makna yang terkait dengan relasi kekuasaan.

Di sisi lain, perkembangan media berbasis platform juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara *framing* dan algoritma. Studi menunjukkan bahwa distribusi berita berbasis platform dapat memperkuat atau mengubah efek *framing* tergantung pada pola konsumsi audiens (Costa et al., 2025). Namun, penelitian lain menegaskan bahwa orientasi editorial masih memainkan peran penting dalam menentukan arah *framing* (Song, 2024).

Ketegangan ini menunjukkan bahwa *framing media digital* tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai produk algoritma semata (Tjoetra & Fahrimal, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah penelitian yang signifikan dalam memahami *framing media* sebagai arena kontestasi diskursus demokrasi, khususnya pada isu relasi sipil–militer dalam media digital. Sebagian besar penelitian *framing* masih berfokus pada identifikasi struktur teks dan kecenderungan naratif media, sementara kajian yang mengaitkan *framing* dengan produksi makna politik, legitimasi demokrasi, dan pertarungan simbolik dalam ruang publik digital masih relatif terbatas. Padahal, dalam isu strategis seperti revisi UU TNI, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor diskursif yang menentukan bagaimana kebijakan negara dipahami, dinegosiasikan, dan diperdebatkan oleh publik.

Perbedaan konstruksi pemberitaan antara Kompas.com dan Tempo.co menunjukkan bahwa *framing media* terhadap revisi UU TNI tidak bersifat netral maupun homogen. Kompas.com, misalnya, membingkai revisi UU TNI sebagai bagian dari “penyesuaian regulasi pertahanan terhadap tantangan keamanan modern” dan “penguatan profesionalisme prajurit dalam menghadapi dinamika keamanan nasional.” Sebaliknya, Tempo.co lebih menonjolkan aspek kritis dengan menyebut revisi tersebut “berpotensi membuka kembali ruang perluasan peran militer di jabatan sipil” serta “memunculkan kekhawatiran terhadap pelemahan supremasi sipil dalam demokrasi.” Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa media secara aktif memproduksi realitas politik melalui seleksi isu, penonjolan makna, dan distribusi legitimasi dalam ruang publik digital. Dengan demikian, *framing media* tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga menjadi bagian dari pertarungan simbolik dalam mendefinisikan makna kebijakan publik dan arah demokrasi kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *framing* pemberitaan revisi UU TNI pada Kompas.com dan Tempo.co serta mengungkap kontribusi *framing media* dalam membentuk kontestasi diskursus demokrasi di ruang digital. Penelitian ini menggunakan model framing Robert N. Entman yang menekankan empat elemen utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation* untuk mengidentifikasi struktur makna yang dibangun oleh masing-masing media. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memposisikan *framing media* tidak sekadar sebagai struktur teks jurnalistik, tetapi sebagai praktik produksi makna dan kekuasaan simbolik dalam demokrasi digital. Pada akhirnya, memahami *framing media* berarti memahami bagaimana realitas politik, legitimasi kebijakan, dan diskursus demokrasi diproduksi serta dipertarungkan dalam ruang publik digital kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing model Robert N. Entman untuk mengkaji konstruksi pemberitaan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dalam konteks kontestasi diskursus demokrasi di ruang digital. Model framing Entman dipilih karena mampu mengidentifikasi proses seleksi isu, penonjolan makna, serta distribusi interpretasi yang dibangun media melalui empat elemen utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Dalam konteks penelitian ini, model Entman relevan digunakan untuk membaca bagaimana Kompas.com dan Tempo.co membingkai revisi UU TNI sebagai realitas politik yang berkaitan dengan relasi sipil-militer, supremasi sipil, dan legitimasi demokrasi di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap struktur narasi, orientasi interpretatif, dan produksi makna yang terkandung dalam teks berita media daring. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap produksi makna, struktur naratif, serta orientasi interpretatif yang dibangun dalam teks berita. Dalam kajian komunikasi politik, framing tidak hanya dipahami sebagai teknik penyajian informasi, tetapi sebagai mekanisme diskursif yang membentuk realitas melalui seleksi isu, atribusi makna, dan penonjolan perspektif tertentu dalam wacana publik (Zaklama, 2025).

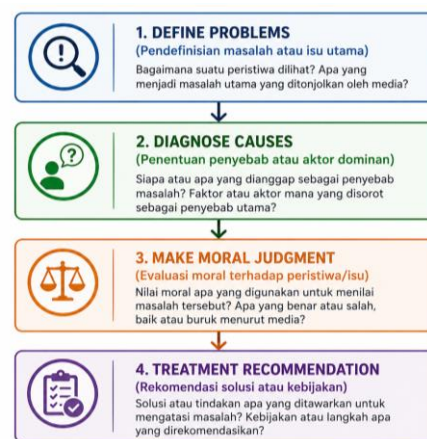
Objek penelitian ini adalah pemberitaan revisi UU TNI pada dua media daring nasional, yaitu Kompas.com dan Tempo.co. Pemilihan kedua media dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan posisi keduanya dalam lanskap jurnalisme Indonesia sebagai representasi spektrum orientasi editorial. Kompas.com merepresentasikan pendekatan jurnalisme yang cenderung stabilisatoris dan institusional, sementara Tempo.co mencerminkan tradisi *watchdog journalism* yang lebih kritis terhadap kekuasaan. Perbedaan ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi secara konseptual merefleksikan variasi posisi diskursif media dalam komunikasi politik, sehingga relevan untuk mengkaji kontestasi *framing* dalam isu yang sensitif seperti relasi sipil–militer.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita yang secara substantif membahas revisi UU TNI. Sampel penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) berita dipublikasikan pada periode Maret–April 2025 sebagai fase intensitas diskursus tertinggi terkait revisi UU TNI, (2) berita secara langsung membahas substansi revisi UU TNI, dan (3) berita berbentuk *hard news* atau *straight news* untuk menjaga konsistensi struktur naratif. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 50 berita yang terdiri dari 30 berita Kompas.com dan 20 berita Tempo.co. Pemilihan periode ini bertujuan untuk

menangkap dinamika *framing* pada momentum diskursif yang paling intens, sehingga memungkinkan analisis yang lebih kontekstual terhadap kontestasi makna.

Analisis data dilakukan menggunakan model framing Robert N. Entman yang menekankan empat perangkat utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Model ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan isu revisi UU TNI, menentukan aktor atau faktor penyebab, memberikan evaluasi moral terhadap kebijakan, serta menawarkan arah solusi dalam pemberitaan. Dalam penelitian ini, keempat elemen framing tersebut digunakan untuk membaca konstruksi makna yang dibangun Kompas.com dan Tempo.co terhadap revisi UU TNI dalam konteks relasi sipil-militer dan diskursus demokrasi digital.

Gambar 1. Model Framing Robert N. Entman



Berdasarkan Gambar 1, model framing Entman digunakan untuk menganalisis bagaimana media mengonstruksi realitas politik melalui seleksi isu, penonjolan aspek tertentu, serta pembentukan interpretasi publik terhadap revisi UU TNI. Keempat elemen tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola framing yang digunakan media dalam membangun legitimasi, kritik, dan makna politik di ruang publik digital.

Untuk memastikan konsistensi dan transparansi analisis, keempat elemen *framing* tersebut dioperasionalkan ke dalam indikator analitis yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik media digital. Operasionalisasi ini berfungsi sebagai instrumen sistematis dalam proses pengkodean, sehingga analisis tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga memiliki dasar prosedural yang dapat ditelusuri. Kerangka operasional tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kerangka Operasional Analisis *Framing*

Elemen <i>Framing</i>	Fokus Analisis	Indikator dalam Teks
<i>Define Problems</i>	Cara media mendefinisikan isu revisi UU TNI	Judul, lead, fokus utama berita
<i>Diagnose Causes</i>	Aktor atau faktor penyebab yang ditonjolkan	Narasumber dominan, atribusi sebab
<i>Make Moral Judgment</i>	Evaluasi normatif terhadap isu	Diksi evaluatif, penilaian implisit/eksplisit
<i>Treatment Recommendation</i>	Solusi atau arah kebijakan yang ditawarkan	Rekomendasi, arah kebijakan, posisi solusi

Sumber: Model framing Entman, 1993

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis, yaitu: (1) pembacaan mendalam terhadap seluruh teks berita untuk memahami konteks dan struktur naratif, (2) identifikasi unit makna yang relevan dengan isu revisi UU TNI, (3) pengkodean data berdasarkan empat elemen framing, dan (4) komparasi lintas media untuk mengidentifikasi pola *framing* yang dominan serta perbedaan orientasi diskursif. Tahapan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga komparatif dan interpretatif dalam membaca kontestasi makna antar media.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan prinsip validitas kualitatif melalui pendekatan *credibility*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* dijaga melalui pembacaan berulang dan triangulasi internal antar teks, *dependability* melalui konsistensi prosedur analisis, serta *confirmability* melalui keterlacakan proses interpretasi berdasarkan indikator operasional yang telah ditetapkan. Selain itu, reflektivitas peneliti juga diperhatikan dengan menyadari bahwa analisis framing bersifat interpretatif, sehingga interpretasi dibatasi pada kerangka analisis yang telah dirumuskan untuk meminimalkan bias subjektif.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis. Analisis difokuskan pada teks berita tanpa mengkaji resepsi audiens, sehingga tidak mengukur secara langsung bagaimana *framing* diterima dan diinterpretasikan oleh publik. Selain itu, objek penelitian terbatas pada dua media daring dan periode waktu tertentu, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk generalisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika *framing* dalam konteks spesifik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan analisis resepsi audiens serta memperluas cakupan media guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak *framing* dalam demokrasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontestasi Makna dalam Framing Revisi UU TNI

Model framing Robert N. Entman digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi mekanisme konstruksi realitas yang dilakukan media melalui empat perangkat utama, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*. Dalam perspektif Entman, framing tidak sekadar berkaitan dengan cara media menyampaikan informasi, tetapi merupakan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membangun definisi masalah, menentukan aktor penyebab, memberikan evaluasi moral, serta mengarahkan interpretasi publik terhadap solusi kebijakan. Dengan demikian, *framing* dipahami sebagai praktik diskursif yang berperan dalam produksi makna dan distribusi legitimasi dalam ruang publik.

Pada penelitian ini, elemen *define problems* digunakan untuk menganalisis bagaimana media mendefinisikan revisi UU TNI sebagai persoalan publik. Elemen *diagnose causes* digunakan untuk mengidentifikasi aktor, institusi, atau faktor yang diposisikan sebagai penyebab utama dalam pemberitaan. Selanjutnya, *make moral judgment* digunakan untuk membaca evaluasi normatif media terhadap revisi UU TNI, sedangkan *treatment recommendation* digunakan untuk mengidentifikasi solusi, arah kebijakan, atau bentuk penyelesaian yang ditawarkan media. Keempat elemen tersebut memungkinkan analisis *framing* tidak berhenti pada struktur teks jurnalistik, tetapi diperluas sebagai upaya membaca pertarungan makna dan kekuasaan simbolik dalam demokrasi digital.

Hasil analisis terhadap 50 berita yang terdiri atas 30 berita Kompas.com dan 20 berita Tempo.co menunjukkan bahwa pemberitaan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak dikonstruksi sebagai realitas tunggal yang objektif, melainkan sebagai arena kontestasi diskursus yang memperlihatkan pertarungan interpretasi politik di ruang publik digital. Kedua media secara konsisten menghadirkan perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan revisi UU TNI, sehingga realitas kebijakan yang terbentuk dalam ruang publik merupakan hasil produksi diskursif yang dipengaruhi oleh orientasi editorial, distribusi legitimasi, dan kepentingan ideologis masing-masing media. Dalam konteks ini, media tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga secara aktif membentuk realitas melalui seleksi isu, penonjolan makna, dan pengaturan horizon interpretasi publik terhadap relasi sipil–militer dan demokrasi.

Pada elemen *define problems*, Kompas.com secara dominan membingkai revisi UU TNI sebagai bagian dari dinamika legislasi yang wajar dan diperlukan dalam sistem pemerintahan. Bahasa yang digunakan cenderung administratif, prosedural, dan institusional

dengan penekanan pada rasionalitas kebijakan serta kebutuhan regulatif negara. Dalam salah satu pemberitaannya, Kompas.com menyebut revisi UU TNI dilakukan untuk “menjawab dinamika kebutuhan organisasi pertahanan nasional” (Kompas.com, 12 Maret 2025). Selain itu, revisi juga diposisikan sebagai upaya “penguatan profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan keamanan modern.” Formulasi tersebut menunjukkan bahwa Kompas.com membangun framing formalistik-institusional dengan menggeser makna revisi UU TNI dari isu politik-demokratis menjadi kebutuhan teknokratis negara. Strategi *framing* ini memperlihatkan upaya normalisasi kebijakan melalui pendekatan stabilisasi diskursus.

Sebaliknya, Tempo.co secara konsisten membingkai revisi UU TNI dalam kerangka kritis-demokratis dengan menekankan potensi implikasi terhadap supremasi sipil dan demokrasi. Dalam salah satu pemberitaannya disebutkan bahwa revisi UU TNI “berpotensi membuka kembali ruang perluasan peran militer di jabatan sipil” (Tempo.co, 18 Maret 2025). Pada berita lain, Tempo.co juga menyoroti adanya “kekhawatiran terhadap pelemahan kontrol sipil dalam demokrasi pascareformasi.” Pilihan diksi seperti potensi ancaman, perluasan peran militer, dan pelemahan supremasi sipil menunjukkan strategi problematisasi yang menempatkan revisi UU TNI dalam horizon risiko demokrasi. Dengan demikian, Tempo.co tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun narasi evaluatif yang mendorong publik untuk mempertanyakan legitimasi dan implikasi kebijakan negara terhadap demokrasi.

Untuk memperjelas kecenderungan *framing* tersebut, dilakukan kuantifikasi terhadap distribusi pola *framing* pada kedua media. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Kompas.com dan Tempo.co dalam mengonstruksi isu revisi UU TNI sebagaimana disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Distribusi Pola *Framing* Revisi UU TNI

Kategori Framing	Kompas.com	Tempo.co
Formalistik-Institusional	22 (73%)	6 (30%)
Kritis-Demokratis	8 (27%)	14 (70%)

Sumber: Hasil analisis peneliti terhadap pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co periode Maret–April 2025

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa Kompas.com secara dominan menggunakan framing formalistik-institusional, sementara Tempo.co lebih banyak mengadopsi *framing* kritis-demokratis. Distribusi ini menunjukkan bahwa perbedaan framing bukan bersifat sporadis, melainkan sistematis dan konsisten. Dengan demikian, *framing media* dapat dipahami sebagai praktik produksi makna yang terstruktur, bukan sekadar variasi gaya

penulisan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa media berperan sebagai aktor diskursif yang aktif dalam membentuk realitas kebijakan.

Lebih jauh, perbedaan dalam definisi masalah ini mencerminkan dua orientasi diskursif yang berbeda, yaitu normalisasi dan problematisasi kebijakan. Kompas.com cenderung menstabilkan realitas melalui pendekatan prosedural, sementara Tempo.co membuka ruang kritik melalui pendekatan evaluatif. Dalam konteks demokrasi digital, kondisi ini menunjukkan bahwa media menjadi arena kontestasi makna yang menentukan bagaimana kebijakan dipahami oleh publik.

Struktur Sumber dan Produksi Legitimasi Diskursif

Analisis terhadap struktur narasumber menunjukkan bahwa perbedaan *framing* antara kedua media sangat dipengaruhi oleh distribusi otoritas dalam teks berita. Kompas.com secara dominan mengutip aktor institusional seperti pemerintah, DPR, dan perwakilan militer, sehingga menghasilkan atribusi sebab yang bersifat teknokratis. Pola ini menunjukkan bahwa media tersebut cenderung memposisikan negara sebagai sumber utama legitimasi dalam pemberitaan, yang pada akhirnya membentuk persepsi publik bahwa revisi UU TNI merupakan kebijakan yang rasional dan diperlukan.

Dalam salah satu berita Kompas.com, seorang pejabat menyatakan bahwa revisi UU TNI bertujuan “memperkuat profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan keamanan modern” (Kompas.com, 20 Maret 2025). Kutipan ini memperkuat legitimasi kebijakan melalui otoritas formal negara, sekaligus menggeser perhatian publik dari implikasi politik menuju kebutuhan fungsional. Dengan demikian, struktur sumber tidak hanya berfungsi sebagai elemen informasi, tetapi sebagai instrumen produksi legitimasi diskursif.

Sebaliknya, Tempo.co menunjukkan komposisi narasumber yang lebih beragam dengan menghadirkan perspektif dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pengamat demokrasi. Dalam salah satu berita disebutkan bahwa revisi UU TNI “harus diawasi ketat agar tidak mengaburkan prinsip supremasi sipil” (Tempo.co, 25 Maret 2025). Kehadiran perspektif ini memperluas ruang interpretasi publik dengan mengaitkan kebijakan pada isu demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa *framing media* tidak dapat dilepaskan dari distribusi kekuasaan simbolik dalam teks berita. Kompas.com cenderung memusatkan legitimasi pada negara, sedangkan Tempo.co mendistribusikan legitimasi kepada aktor non-negara. Dalam perspektif komunikasi politik, hal ini mencerminkan adanya negosiasi otoritas dalam wacana

publik. Untuk merangkum perbedaan tersebut secara sistematis, sintesis peran diskursif media dalam pemberitaan revisi UU TNI dapat dilihat pada Tabel 3 berikut

Tabel 3. Sintesis Peran Diskursif Media

Dimensi	Kompas.com	Tempo.co
Posisi	Stabilizer	Problematizer
Legitimasi	Negara	Sipil
Kritik	Moderat	Tinggi
Solusi	Institusional	Publik

Sumber: Hasil analisis peneliti terhadap pemberitaan Kompas.com dan Tempo.co periode Maret–April 2025

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa Kompas.com berfungsi sebagai *stabilizer* yang menormalisasi kebijakan melalui legitimasi institusional, sementara Tempo.co berperan sebagai *problematizer* yang membuka ruang kritik melalui legitimasi masyarakat sipil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan arah legitimasi dalam diskursus publik. Dengan demikian, *framing media* berfungsi sebagai instrumen distribusi kekuasaan simbolik dalam demokrasi digital.

Intensitas Evaluasi dan Polarisasi Diskursus Demokrasi

Pendalaman terhadap dimensi evaluasi normatif menunjukkan bahwa perbedaan framing antara Kompas.com dan Tempo.co tidak sekadar berkaitan dengan variasi gaya bahasa jurnalistik, melainkan merepresentasikan strategi diskursif yang berbeda dalam mengelola legitimasi kebijakan di ruang publik. Kompas.com, melalui penggunaan bahasa yang moderat dan prosedural, secara konsisten membatasi intensitas konflik diskursif dengan menempatkan kritik dalam posisi yang terkendali dan tidak dominan. Praktik ini menghasilkan apa yang dapat dikonseptualisasikan sebagai *discursive containment*, yaitu upaya membatasi ruang kritik melalui penyederhanaan dan netralisasi makna dalam pemberitaan.

Strategi tersebut tidak dapat dipahami sebagai netralitas semata, melainkan sebagai bentuk intervensi diskursif yang secara implisit mengarahkan pembaca pada interpretasi yang stabil terhadap kebijakan. Dengan menghindari diksi yang konfrontatif dan meminimalkan elaborasi terhadap implikasi demokrasi, Kompas.com tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga mempersempit ruang bagi problematisasi kebijakan. Dalam konteks ini, *framing* berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi yang mempertahankan legitimasi kebijakan melalui kontrol terhadap intensitas evaluasi publik (Anshori et al., 2022).

Sebaliknya, Tempo.co menunjukkan pola yang berlawanan dengan secara aktif memperluas ruang konflik diskursif melalui penggunaan bahasa yang evaluatif dan normatif.

Pilihan diksi yang menekankan risiko, kekhawatiran, dan potensi kemunduran demokrasi menunjukkan bahwa framing tidak hanya berfungsi sebagai representasi, tetapi sebagai alat problematisasi yang mengundang pembaca untuk terlibat dalam proses evaluasi kritis. Dalam konteks ini, *framing* berfungsi sebagai mekanisme *discursive amplification*, yaitu upaya memperbesar signifikansi isu melalui peningkatan intensitas evaluasi.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa media memiliki kapasitas untuk mengatur tingkat konflik dalam diskursus publik, bukan hanya mencerminkan konflik yang sudah ada. Kompas.com cenderung mereduksi konflik melalui stabilisasi narasi, sementara Tempo.co justru memproduksi dan memperluas konflik sebagai bagian dari fungsi kritik terhadap kekuasaan. Dengan demikian, framing tidak hanya menentukan bagaimana isu dipahami, tetapi juga bagaimana konflik sosial dan politik dikonstruksi dalam ruang publik.

Lebih jauh, intensitas evaluasi ini juga berkaitan dengan konstruksi audiens yang diasumsikan oleh masing-masing media. Kompas.com tampaknya mengonstruksi audiens sebagai subjek yang membutuhkan stabilitas dan kepastian, sehingga *framing* yang dihasilkan cenderung menghindari ambiguitas dan konflik. Sebaliknya, Tempo.co mengonstruksi audiens sebagai subjek kritis yang mampu terlibat dalam evaluasi kebijakan, sehingga *framing* yang digunakan lebih terbuka terhadap perdebatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa framing tidak hanya membentuk makna, tetapi juga membentuk posisi epistemik audiens dalam memahami realitas politik.

Dalam perspektif yang lebih luas, polarisasi *framing* ini mencerminkan adanya diferensiasi peran media dalam demokrasi digital, yaitu sebagai *stabilizer* dan *problematizer*. Polarisasi ini tidak hanya menciptakan keberagaman perspektif, tetapi juga membuka kemungkinan fragmentasi dalam pemahaman publik. Dalam kondisi di mana konsumsi media semakin tersegmentasi, perbedaan *framing* berpotensi menghasilkan realitas yang berbeda bagi kelompok audiens yang berbeda, sehingga memperumit proses pembentukan konsensus dalam demokrasi.

Dengan demikian, intensitas evaluasi dalam framing media tidak dapat dipahami sebagai aspek sekunder, melainkan sebagai elemen kunci dalam produksi dan distribusi makna politik. *Framing* menjadi mekanisme yang tidak hanya mengatur apa yang dipikirkan publik, tetapi juga bagaimana publik menilai dan merespons kebijakan negara (Zaklama, 2025). Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai aktor yang secara aktif membentuk dinamika demokrasi melalui pengelolaan konflik diskursif.

***Framing* sebagai Praktik Kekuasaan Simbolik dalam Demokrasi Digital**

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *framing media* dalam pemberitaan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak dapat dipahami semata sebagai teknik representasi realitas, melainkan sebagai praktik kekuasaan simbolik yang beroperasi dalam ruang diskursif demokrasi digital. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, kekuasaan simbolik bekerja melalui kemampuan aktor sosial dalam menentukan makna yang dianggap sah dan legitim dalam ruang publik (Bourdieu, 1991).

Dalam konteks media digital, *framing media* dapat dipahami sebagai mekanisme simbolik yang mengatur batas legitimasi dalam diskursus publik melalui seleksi isu, penonjolan perspektif, dan distribusi otoritas makna. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung mereproduksi legitimasi negara melalui *framing* formalistik-institusional, sedangkan Tempo.co menghadirkan framing kritis-demokratis yang membuka ruang problematisasi terhadap revisi UU TNI. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menentukan isu apa yang dianggap penting, dapat diperdebatkan, dan diterima sebagai kebenaran dalam ruang publik digital. Temuan ini sejalan dengan studi López-Rabadán (2022) yang menegaskan bahwa *framing* dalam era media digital berfungsi sebagai praktik produksi makna yang memengaruhi pembentukan opini publik dan konfigurasi kekuasaan diskursif. Selain itu, penelitian Berk (2025) menunjukkan bahwa framing media dalam lingkungan informasi digital berperan penting dalam membangun legitimasi politik melalui penonjolan perspektif tertentu dan marginalisasi interpretasi alternatif.

Dalam kerangka ini, Kompas.com melalui pendekatan formalistik-institusional berperan dalam mereproduksi legitimasi negara dengan menempatkan kebijakan dalam horizon rasionalitas administratif. Strategi ini tidak hanya menormalisasi kebijakan, tetapi juga membatasi kemungkinan munculnya interpretasi alternatif yang bersifat kritis. Dengan memusatkan otoritas pada aktor institusional dan mereduksi intensitas evaluasi normatif, Kompas.com secara tidak langsung memperkuat dominasi narasi negara dalam ruang publik. Dalam perspektif Michel Foucault, praktik ini dapat dibaca sebagai bentuk kontrol diskursif, di mana kekuasaan bekerja melalui produksi pengetahuan yang menentukan apa yang dapat dikatakan dan apa yang harus dikecualikan.

Sebaliknya, Tempo.co menunjukkan kecenderungan untuk mendekonstruksi dominasi tersebut dengan menghadirkan perspektif yang lebih kritis dan plural. Dengan menyoroti potensi implikasi revisi UU TNI terhadap supremasi sipil dan kualitas demokrasi, Tempo.co membuka ruang bagi reinterpretasi realitas yang tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi

negara. Dalam konteks ini, *framing* berfungsi sebagai alat resistensi simbolik yang memungkinkan munculnya wacana alternatif dalam ruang publik. Temuan ini menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai reproduktor kekuasaan, tetapi juga sebagai arena di mana kekuasaan tersebut dapat dipertanyakan dan dinegosiasikan.

Akan tetapi, relasi antara kedua bentuk *framing* ini tidak bersifat dikotomis, melainkan dialektis. Kontestasi antara stabilisasi dan problematisasi menghasilkan dinamika diskursus yang kompleks, di mana berbagai makna bersaing untuk memperoleh legitimasi dalam ruang publik. Dalam konteks demokrasi digital, kondisi ini menunjukkan bahwa realitas politik tidak lagi ditentukan oleh satu narasi dominan, tetapi merupakan hasil dari pertarungan simbolik yang terus berlangsung. Dengan demikian, *framing* media berfungsi sebagai arena di mana kekuasaan diproduksi, direproduksi, dan sekaligus dipertentangkan.

Dinamika *framing* ini tidak dapat dilepaskan dari logika platform yang mengatur distribusi informasi dalam ruang digital. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi editorial masih memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan *framing*, distribusi berbasis algoritma berperan sebagai amplifier yang memperkuat atau melemahkan visibilitas narasi tertentu. Dengan demikian, kekuasaan simbolik dalam media digital tidak hanya terletak pada produksi makna, tetapi juga pada distribusi makna yang dimediasi oleh teknologi. Dalam kondisi ini, *framing* tidak hanya menentukan bagaimana realitas dipahami, tetapi juga seberapa luas realitas tersebut dapat diakses oleh publik.

Dampak dari temuan ini menunjukkan bahwa media memiliki peran ambivalen dalam demokrasi digital, yaitu sebagai fasilitator sekaligus pembatas diskursus. Di satu sisi, *framing* memungkinkan munculnya berbagai perspektif yang memperkaya diskursus publik. Di sisi lain, dominasi *framing* tertentu berpotensi membatasi ruang interpretasi dan mengarahkan opini publik ke arah yang spesifik. Dengan demikian, *framing* media tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga menentukan batas kemungkinan demokrasi itu sendiri dalam ruang digital.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa *framing media* merupakan bagian integral dari struktur kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Memahami *framing* berarti memahami bagaimana makna diproduksi, dinegosiasikan, dan dipertarungkan dalam ruang publik digital. Dalam konteks ini, analisis *framing* tidak hanya relevan sebagai pendekatan metodologis, tetapi juga sebagai lensa kritis untuk membaca dinamika kekuasaan dalam demokrasi digital.

Implikasi *Framing* terhadap Deliberasi dan Kualitas Demokrasi Digital

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *framing media* atas revisi UU TNI memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas deliberasi dalam demokrasi digital. Dalam perspektif Jürgen Habermas, demokrasi yang ideal mensyaratkan adanya ruang publik yang memungkinkan pertukaran argumen secara rasional, setara, dan inklusif. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan *framing* antara Kompas.com dan Tempo.co tidak hanya memperkaya perspektif, tetapi juga membentuk konfigurasi diskursus yang tidak sepenuhnya simetris. Dengan demikian, *framing media* tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai mekanisme yang menentukan kualitas interaksi deliberatif dalam ruang publik.

Dalam konteks ini, Kompas.com melalui *framing stabilisatoris* cenderung mengurangi intensitas konflik diskursif dengan menekankan rasionalitas kebijakan dan stabilitas institusional. Strategi ini secara teoritis dapat mendukung kondisi deliberasi yang lebih tertib dan terkontrol, namun pada saat yang sama berpotensi membatasi eksplorasi kritis terhadap kebijakan. Sebaliknya, Tempo.co melalui *framing problematisatoris* memperluas ruang kritik dengan menyoroti implikasi demokratis dari revisi UU TNI. Pendekatan ini membuka ruang refleksi yang lebih dalam, tetapi juga berpotensi meningkatkan polarisasi dalam diskursus publik.

Sejalan dengan penelitian mutakhir yang menunjukkan bahwa media digital memiliki peran ambivalen dalam demokrasi, yaitu sebagai fasilitator sekaligus pembatas deliberasi. Namun, berbeda dengan argumen yang menyatakan bahwa platformisasi media cenderung menghomogenisasi konten, penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi editorial masih memainkan peran penting dalam membentuk arah *framing*. Dengan demikian, keberagaman *framing* tidak hanya mencerminkan pluralitas media, tetapi juga menunjukkan bahwa media tetap memiliki agensi dalam menentukan dinamika diskursus publik.

Lebih jauh, implikasi terhadap deliberasi tidak dapat dilepaskan dari pola konsumsi informasi dalam ruang digital yang semakin terfragmentasi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma platform cenderung membentuk *echo chambers* dan *filter bubbles*, di mana audiens lebih sering terpapar pada informasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Dalam konteks ini, perbedaan *framing* antara Kompas.com dan Tempo.co berpotensi tidak menghasilkan dialog yang konstruktif, tetapi justru memperkuat fragmentasi persepsi. Audiens yang mengonsumsi *framing* stabilisatoris akan melihat kebijakan sebagai rasional,

sementara audiens yang terpapar *framing* kritis akan melihatnya sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas deliberasi dalam demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh keberagaman informasi, tetapi juga oleh distribusi dan akses terhadap informasi tersebut. *Framing media* berfungsi sebagai titik awal dalam proses ini, karena menentukan bagaimana isu diposisikan sebelum masuk ke dalam ruang publik yang lebih luas. Dengan demikian, *framing* tidak hanya membentuk isi diskursus, tetapi juga struktur diskursus itu sendiri.

Selain itu, *framing media* juga berperan dalam produksi legitimasi kebijakan. Dalam isu keamanan seperti revisi UU TNI, media memiliki kapasitas untuk memperkuat atau melemahkan legitimasi melalui seleksi narasi. Kompas.com cenderung memperkuat legitimasi kebijakan melalui framing institusional, sementara Tempo.co menantang legitimasi tersebut melalui *framing* kritis. Dengan demikian, *framing* tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga berkontribusi dalam proses legitimasi dan delegitimasi kebijakan dalam demokrasi.

Pluralitas *framing* ini juga membawa konsekuensi normatif terhadap kualitas demokrasi. Di satu sisi, keberagaman perspektif dapat memperkaya diskursus publik dan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Di sisi lain, dalam kondisi konsumsi media yang terfragmentasi, pluralitas ini berpotensi menghasilkan polarisasi yang menghambat terbentuknya pemahaman bersama. Dalam konteks ini, framing media berfungsi sebagai pedang bermata dua yang dapat memperkuat sekaligus melemahkan demokrasi digital.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan transparansi *framing* dalam pemberitaan kebijakan strategis, serta penguatan literasi media di kalangan publik. Media perlu menyadari perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai aktor yang membentuk kondisi deliberasi publik. Sementara itu, publik perlu memiliki kapasitas kritis untuk membaca *framing media* secara reflektif agar tidak terjebak dalam fragmentasi persepsi.

Penelitian ini menegaskan bahwa *framing media* memiliki implikasi yang melampaui level representasi, yaitu mempengaruhi struktur deliberasi, distribusi kekuasaan simbolik, dan kualitas demokrasi digital. Memahami *framing* berarti memahami bagaimana demokrasi itu sendiri dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertarungkan dalam ruang publik digital yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *framing media* atas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) merupakan praktik konstruksi diskursif yang mencerminkan perbedaan orientasi editorial dalam ruang digital. Kompas.com cenderung membingkai isu dalam kerangka formalistik-institusional yang menekankan rasionalitas kebijakan dan stabilitas prosedural, sedangkan Tempo.co mengonstruksi pemberitaan dalam bingkai kritis-demokratis yang menyoroti potensi implikasi terhadap supremasi sipil dan kualitas demokrasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa media tidak sekadar merepresentasikan realitas, tetapi secara aktif membentuk horizon interpretasi publik melalui seleksi makna dan penonjolan perspektif tertentu.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat posisi *framing* sebagai mekanisme utama dalam produksi dan kontestasi makna dalam komunikasi politik digital. Keberadaan dua pola *framing* yang berbeda sebagai *stabilizer* dan *problematizer* menunjukkan bahwa media daring masih mempertahankan agensi editorial di tengah tekanan logika platform. Dengan demikian, demokrasi digital tidak hanya ditentukan oleh distribusi informasi berbasis algoritma, tetapi juga oleh bagaimana media mengonstruksi dan mengarahkan diskursus publik. Implikasi ini menegaskan bahwa *framing* media berperan sebagai *locus* penting dalam memahami relasi antara kekuasaan simbolik, kebijakan negara, dan dinamika demokrasi kontemporer.

Secara praktis, pluralitas *framing* yang ditemukan berpotensi memperkaya deliberasi publik, namun sekaligus membuka kemungkinan fragmentasi persepsi dalam masyarakat yang semakin tersegmentasi secara digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi media menjadi krusial agar publik mampu membaca dan mengkritisi konstruksi makna yang disajikan media. Penelitian ini masih terbatas pada analisis teks dari dua media dan periode tertentu, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan media serta mengintegrasikan analisis resepsi audiens guna memahami dampak *framing* secara lebih komprehensif dalam ekosistem demokrasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Halim, U., Hidayat, N., & Marta, R. F. (2024). Pertentangan Kecemasan dan Perilaku dalam Membentuk Sikap Politik Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 22(1), 141. <https://doi.org/10.31315/jik.v22i1.7068>
- Anshori, M., Pawito, P., Kartono, D. T., & Hastjarjo, S. (2022). Comparative Framing: Media Strategy in Public Communication Policy. *KnE Social Sciences*, 2022, 126–139. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i5.10545>
- Ariel, Y., & Elishar, V. (2025). Political Communication and the Hype Cycle: Tracing Its Evolution Across the Digital Era. *Journalism and Media*, 6(2). <https://doi.org/10.3390/journalmedia6020087>
- Berk, N. (2025a). The Impact of Media Framing in Complex Information Environments. *Political Communication*, 42(5), 757–773. <https://doi.org/10.1080/10584609.2025.2456519>
- Berk, N. (2025b). The Impact of Media Framing in Complex Information Environments. *Political Communication*, 42(5), 757–773. <https://doi.org/10.1080/10584609.2025.2456519>
- Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.
- Costa, T. C., Rafael, D. N., & Filho, M. C. (2025). Framing Effect Intellectual Structure Mapping: A Bibliometric Review. *Journal of Scientometric Research*, 14(1), 113–131. <https://doi.org/10.5530/jscires.20250943>
- Croissant, A., Kuehn, D., Chambers, P. W., & Wolf, S. O. (2011). Conceptualising civil-military relations in emerging democracies. *European Political Science*, 10(2), 137–145. <https://doi.org/10.1057/eps.2011.2>
- Happer, C., & Philo, G. (2013). The role of the media in the construction of public belief and social change. *Journal of Social and Political Psychology*, 1(1), 321–336. <https://doi.org/10.5964/jspp.v1i1.96>
- Hastuti, H., Maulana, H. F., Lawelai, H., & Suherman, A. (2025). Algorithmic influence and media legitimacy: a systematic review of social media's impact on news production. *Frontiers in Communication*, 10(October), 1–22. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1667471>
- Ikhwan Nur Ramadhan, Damar Arrya Akbar A, Fajar Kurniawan, & Herdandi Bagus A.P. (2025). Penyusunan RUU Revisi TNI di Tengah Penolakan Masyarakat. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(4), 228–234. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1374>
- Khairurrizqo, K. (2024). Military Reform: Informal Military Power in Indonesian Politics After 1998. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(3), 898–909. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i3.39387>
- Koivula, A., Marttila, E., & Koiranen, I. (2024). Media framing and trust: A randomized survey experiment on attitudes towards the unvaccinated during the COVID-19 pandemic. *Social Sciences and Humanities Open*, 10(September), 101157. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101157>
- López-Rabadán, P. (2022). Framing studies evolution in the social media era. Digital advancement and reorientation of the research agenda. *Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.3390/socsci11010009>
- Mansoor, H. M. H. (2024). Media and information literacy as a model of societal balance: A grounded meta-synthesis. *Heliyon*, 10(3), e25380. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25380>
- Marttila, E., & Koivula, A. (2025). Framing, emotions, and morality: Understanding media influence on moral attitudes towards the unvaccinated during COVID-19. *Social Science Journal*, 62(2), 478–493. <https://doi.org/10.1080/03623319.2024.2441897>
- Nasrullah. (2026). Framing Political Legitimacy after the 2024 Indonesian Presidential Election: A

- Comparative Analysis of Detik.com and Kompas.com Nasrullah 1*. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 12(1), 73–89. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v12i1.43549>
- Olsen, R. K., & Sjøvaag, H. (2025). Platform Retraction? Discourses of Entanglement and Disentanglement in News Media's Platform Engagement. *Digital Journalism*, 0(0), 1–20. <https://doi.org/10.1080/21670811.2025.2570497>
- Pugu, M. R., Triolita, N., & Yusuf, M. (2024). New Media and The Changing Landscape Of Political Communication. *Injoser*, 2(6), 1591–1605. <https://www.researchgate.net/publication/380896300>
- Santos, Í., Carvalho, L. M., & Portugal e Melo, B. (2022). The media's role in shaping the public opinion on education: A thematic and frame analysis of externalisation to world situations in the Portuguese media. *Research in Comparative and International Education*, 17(1), 29–50. <https://doi.org/10.1177/17454999211057753>
- Song, Q. (2024). Framing in media and communication studies: A bibliometric analysis. *Insight - News Media*, 7(1), 674. <https://doi.org/10.18282/inm674>
- Tjoetra, A., & Fahrimal, Y. (2024). Analisis Framing Media Detik . com dan CNN Indonesia pada Pemberitaan Konflik Pulau Rempang. *Jurnal Publish*, 3(1).
- Tunca, S., & Budhathoki, M. (2026). Visibility Without Feasibility: Media Discourse and Institutional Stabilization of Pesticide-Free Farming in a High-Regulation. *World*, 1–25.
- Yusnaini, Y., Nufus, H., Saleh, R., & Wibowo, W. A. S. (2025). The Digital Era and the Evolution of Media Paradigms: A Critical Review of the Adaptation of Old Media in New Media Ecosystems. *Society*, 13(1), 573–599. <https://doi.org/10.33019/society.v13i1.853>
- Zaklama, S. (2025). Exploring the Foundations of Media Framing Theory. *European Modern Studies Journal*, 9(1), 75–89. [https://doi.org/10.59573/emsj.9\(1\).2025.7](https://doi.org/10.59573/emsj.9(1).2025.7)